

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin. 2006. *Metode Penelitian Hukum Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- H.S., Salim. 2005. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA*, Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria di Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perlindungan, A.P. 1991. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Perlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP No.24/1997*, Bandung: Mandar Maju
- Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sutedi, Andrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, H.B. 1988. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Website/Internet

Penjelasan dan fungsi PPAT, di akses dari www.notarisdanppat.com, di akses pada tanggal 14 september 2017, pukul 18:30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Wawancara Pribadi

Ibu Renggani Kusumawati, SH., M.Kn, Notaris PPAT di Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 03 Januari 2018, pukul 10.30 WIB.

Sutiato, PPAT Sementara di Kabupaten Klaten (Lurah Cokro), *Wawancara Pribadi*, Klaten, 05 Januari 2018, pukul 09.00 WIB.